

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat (AS) merupakan negara adidaya yang kerap kali memberikan bantuan luar negerinya kepada negara lain maupun terhadap organisasi internasional. Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri merupakan transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana.¹ Bantuan luar negeri AS sendiri merupakan amanat yang tercantum dalam konstitusi AS yaitu *Foreign Assistance Act Law* yang disahkan oleh kongres pada tahun 1961. Undang-undang ini secara signifikan mengatur ulang bantuan luar negeri AS yang membedakan bantuan militer dan non-militer dengan membentuk badan baru yaitu *The United States Agency for international Development (USAID)*.²

USAID sudah menjadi instrumen kebijakan luar negeri AS dalam memberikan bantuan luar negeri yang mencakup pemberian bantuan dasar manusia. Bantuan diberikan kepada negara yang sedang mengalami krisis dan dapat disalurkan kepada badan kemanusiaan atau lembaga swadaya masyarakat.³ Dalam isu bantuan luar negeri AS terhadap UNRWA, AS melalui USAID telah memberikan bantuan signifikan kepada Palestina melalui kebijakan legislatif yaitu

¹ K.J. Holsti, *International Politics: Framework of Analysis*, (New Jersey, 1995)

² Usaid.gov, "The Foreign Assistance Act of 1961, as amended", diakses pada 16 Mei 2024, <https://www.usaid.gov/document/foreign-assistance-act-1961-amended>

³ Usaid.gov, "USAID History", diakses pada 16 Mei 2024, <https://www.usaid.gov/about-us/usaid-history>

Nita M. lowey Middle East partnership for Peace Act (MEPPA) yang disahkan oleh kongres pada tahun 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk memajukan hidup berdampingan secara damai antara Israel dan Palestina guna memungkinkan solusi dua negara yang berkelanjutan dengan mengalokasikan bantuan dana hingga US\$ 250 juta. Dalam melaksanakan program MEPPA ini, penyaluran bantuan dana kepada UNRWA dilaksanakan melalui badan pembangunan internasional AS, USAID. Hal ini dikarenakan bantuan luar negeri AS kepada palestina disalurkan melalui pendanaan tahunan kepada UNRWA. Dilihat dari kepentingan AS melalui MEPPA adalah untuk program pembangunan perdamaian antar masyarakat, memajukan pembangunan komunitas bersama, hidup berdampingan secara damai, dialog, dan rekonsiliasi Israel dan Palestina.⁴

UNRWA merupakan badan tambahan dari PBB yang dibentuk pada tanggal 8 Desember 1949 yang memulai operasinya pada tanggal 1 Mei 1950.⁵ UNRWA dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 302, yang dibentuk khusus untuk para pengungsi Palestina.⁶ Saat ini UNRWA menjadi lembaga yang memberikan bantuan kemanusiaan terbesar di Palestina. UNRWA beroperasi di lima daerah operasi, yaitu di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat. UNRWA memberikan layanan mencakup pendidikan, layanan Kesehatan, bantuan

⁴ Usaid.gov, "Nita M. Lowey Middle East Partnership for Peace Act (MEPPA)", diakses pada 16 Mei 2024, <https://www.usaid.gov/west-bank-and-gaza/meppa>

⁵ www.un.org, "About UNRWA", diakses pada 19 Maret 2024, https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2022/10/UNRWAFACETSHEET_150922.pdf

⁶ [Unrwa.org](https://www.unrwa.org), "Resolution 302" diakses pada 23 Februari 2024, <https://www.unrwa.org/content/resolution-302?>

dan layanan sosial, serta perbaikan infrastruktur dan perbaikan untuk 58 kamp pengungsi Palestina.⁷

Dalam menjalankan tugasnya UNRWA memiliki 28,044 orang staf dengan 27,858 staf merupakan pengungsi Palestina. Jumlah pengungsi yang terdaftar sebagai penerima bantuan dan layanan UNRWA adalah sekitar 5,9 juta jiwa.⁸ UNRWA juga mengoperasikan 900 intalasi di lima wilayah operasinya dan memiliki 550,00 orang pengungsi yang terdaftar dalam sekolah UNRWA. Berdasarkan inilah UNRWA adalah organisasi kemanusiaan terbesar dan perannya sangat vital dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak akibat konflik yang terjadi saat ini.⁹

Belakangan ini, konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang sangat menyita perhatian dunia. Konflik yang baru-baru ini terjadi adalah konflik antara Hamas dan Israel yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023. Amerika Serikat (AS) menetapkan serangan tersebut dipimpin oleh Hamas. Serangan yang dilakukan oleh Hamas tersebut mengakibatkan terbunuhnya warga Israel dan penyanderaan sekitar 253 warga Israel termasuk lima diantaranya warga negara Amerika.¹⁰

⁷ Rhoda margesson, JimZanotti “*The United Natios Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East (UNRWA): Overview and the U.S. Funding pause*”, Congressional Research Service. 2024

⁸ Rhoda margesson, JimZanotti “*The United Natios Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East (UNRWA): Overview and the U.S. Funding pause*”, Congressional Research Service. 2024

⁹ Yasmen Abu-Laban (2023), “*What UNWRA Tells Us About Refugees and the United Nations*”, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands

¹⁰ Jim Zanotti, Jeremy M. Sharp, “*Israel and Hamas Conflict In Brief: Overview, U.S. Policy, and Option for Congress*”, Congressional Research Service. 2024

Menanggapi serangan tersebut, Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan melancarkan serangkaian pemboman udara dan operasi darat di Gaza. Akibat dari serangan tersebut, lebih dari 31.000 warga Palestina di Gaza terbunuh. Konflik ini juga mengakibatkan sekitar 1,7 juta warga Gaza terpaksa mengungsi dari total 2,1 juta populasi Gaza. Banyaknya korban jiwa pada konflik ini, mengakibatkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Krisis kemanusiaan ini mengakibatkan bantuan kemanusiaan sangat dipelukan bagi warga Gaza terutama bantuan untuk kebutuhan dasar mereka.¹¹ Dalam merespon krisis kemanusiaan yang terjadi, PBB melalui *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* membantu memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak akibat konflik yang terjadi.

Dalam menjalankan mandatnya, UNRWA sebagai lembaga kemanusiaan sangat bergantung pada dana yang diberikan oleh negara donor. AS merupakan negara donor terbesar dan konsisten memberikan bantuan kepada lembaga tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Harry S. Truman, AS mengesahkan bantuan kepada UNRWA senilai US\$16 juta pasca pecahnya perang Arab-Israel pada tahun 1949. Bantuan yang diberikan bertujuan untuk menjaga stabilitas jangka panjang di Timur Tengah dengan mengintegrasikan pengungsi Palestina kedalam kehidupan ekonomi di wilayah tersebut.¹² Pada tahun 2021 AS memberikan bantuan dana terbesar dengan jumlah US\$ 338,4 juta atau setara 46 persen dari total seluruh bantuan yang diterima oleh UNRWA. Pada tahun 2022 dengan jumlah US\$ 343,9

¹¹ Jim Zanotti, Jeremy M. Sharp, *“Israel and Hamas Conflict In Brief: Overview, U.S. Policy, and Option for Congress”*, Congressional Research Service. 2024

¹² Politico.com, *“Truman approves aid to Palestine, March 24, 1949”* diakses pada 05 Mei 2024 <https://www.politico.com/story/2017/03/truman-approves-aid-to-palestine-march-24-1949-236260>

juta atau setara total 44 persen dari total seluruh bantuan yang diterima UNRWA.¹³ Secara total AS telah memberikan kontribusinya dengan jumlah US\$ 7,1 miliar sejak tahun 1950. Namun, pasca kritik AS dalam keterlibatan staff UNRWA pada serangan 7 Oktober yang lalu. AS pada masa pemerintahan Joe Biden pada tanggal 26 Januari 2024 AS mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan pendanaan kepada badan tersebut.¹⁴

Kebijakan penghentian bantuan dana AS kepada UNRWA bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh AS. Sebelumnya pada tahun 2018 AS pada masa pemerintahan Presiden Trump juga pernah membuat kebijakan yang menghentikan bantuan dana kepada organisasi tersebut.¹⁵ Kemudian AS memberikan kembali bantuan tersebut pada tahun 2021 di masa pemerintahan Presiden Joe Biden dengan memberikan bantuan sebesar US\$ 235 juta kepada organisasi tersebut sebelum Biden menghentikan kembali bantuannya kepada UNRWA.¹⁶

Pasca terjadinya serangan 7 Oktober 2023 yang lalu membuat AS melakukan kebijakan untuk menghentikan bantuannya terhadap UNRWA. Kebijakan ini dinilai merugikan Palestina dan melanggar komitmen AS dalam mencari solusi damai dua negara sesuai undang-undang *Nita M. Lowey Middle East Partnership for Peace Act* (MEPPA). Sebelumnya Joe Biden juga berjajnji

¹³ Unrwa.org, “Donor Charts” diakses pada 20 Maret 2024. <https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends/donor-charts>

¹⁴ Rhoda Margesson, Jim Zanotti “The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA): Overview and the U.S. Funding Pause”, Congressional Research Service. 2024

¹⁵ Washingtonpost.com, “Trump administration to end U.S. funding to U.N. program for Palestinian refugees”, diakses pada 20 Maret 2024, <https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-administration-to-end-us-funding-to-un-program-for-palestinian-refugees/2018/08/30/>

¹⁶ bbc.com, “Biden administration to restore \$235m of US aid to Palestinians”, diakses pada 20 Maret 2024, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56665199>

mengembalikan bantuan AS kepada UNRWA pada tahun 2021 yang sebelumnya sempat dihentikan oleh Donald Trump. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri AS ini menarik untuk diteliti untuk mengetahui alasan mengapa AS melakukan kebijakan penghentian bantuan terhadap UNRWA tahun 2024 ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konstitusi, kebijakan pemberian bantuan luar negeri AS telah diatur dalam undang-undang *Foreign Assistance Act Law* yang disahkan pada tahun 1961. Undang-undang ini membentuk satu badan yang berfungsi untuk memberikan bantuan luar negeri kemanusiaan yaitu *The United States Agency for international Development* (USAID). Melalui USAID, AS telah memberikan bantuan luar negerinya kepada negara maupun organisasi internasional. Salah satu negara yang diberikan bantuan oleh AS adalah Palestina melalui UNRWA. Bantuan luar negeri AS ini berdasarkan undang-undang yaitu *Nita M. lowey Middle East partnership for Peace Act* (MEPPA) yang disahkan oleh kongres pada tahun 2020. Sejak tahun 1950, AS telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada UNRWA. AS secara konsisten menerapkan kebijakan pemberian bantuannya kepada badan kemanusiaan untuk Palestina tersebut. Namun, pasca pecahnya konflik 7 Oktober 2023 yang lalu, AS menghentikan bantuannya kepada UNRWA. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berbeda pasca terpilihnya Presiden Joe Biden pada tahun 2021.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dari penelitian ini adalah “Mengapa

Amerika Serikat (AS) menghentikan bantuannya terhadap *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)*”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa Amerika Serikat (AS) menghentikan bantuannya terhadap *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)*.

1.5 Manfaat Penelitian

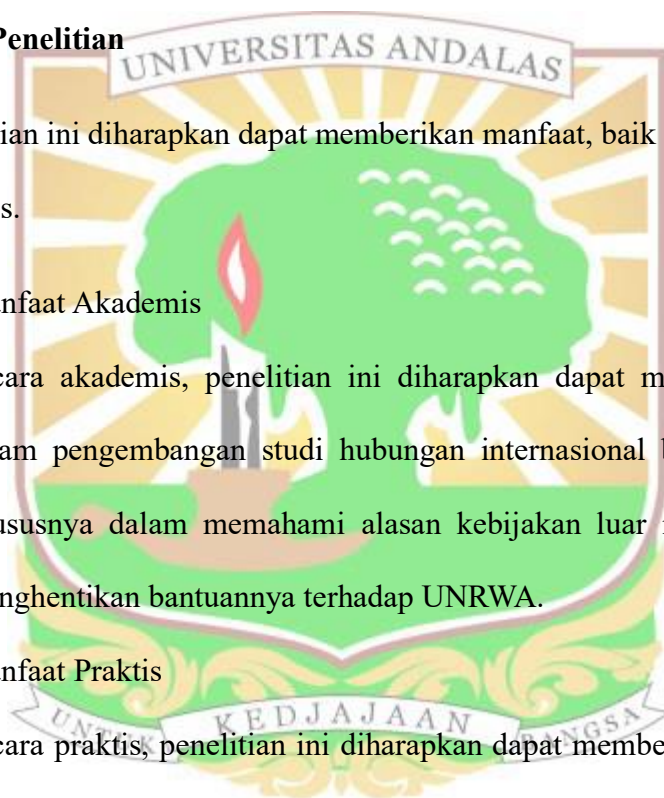
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis.

a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional bagi mahasiswa khususnya dalam memahami alasan kebijakan luar negeri AS yang menghentikan bantuannya terhadap UNRWA.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang mempengaruhi dinamika politik sebuah negara dalam pembentukan kebijakan luar negeri baik dengan negara lain, maupun dengan organisasi internasional. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan kepada organisasi internasional dalam membuat kebijakan dan keputusan dalam pengambilan sikap terhadap suatu negara maupun organisasi internasional.



1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan pengkajian terhadap lima literatur yang memiliki pembahasan serupa terkait isu yang diangkat. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif terkait topik yang dibahas.

Literatur pertama merupakan tulisan dari Hamza Salman, Rohaida Nordin, dan Shahrul Mizan Ismail yang berjudul *A Critical Appraisal of the UNRWA-USA Framework Cooperation (2021-2022) Regarding Palestinian Refugees*. Tulisan ini menjelaskan tentang bantuan kemanusiaan AS kepada UNRWA sangat bersifat politis. Pada masa pemerintahan Presiden Trump AS pernah memberhentikan bantuan kemanusiaan kepada UNRWA, namun bantuan tersebut dikembalikan pada masa Presiden Biden. Pemberian kembali bantuan tersebut diberikan dengan banyaknya kebijakan AS yang harus diikuti oleh UNRWA. Kebijakan tersebut merupakan upaya AS dalam menjaga kepentingan nasionalnya terutama kepentingan Israel sebagai negara yang menjajah Palestina.¹⁷

AS menerapkan kebijakan kontra-terorisme dalam syarat pemberian bantuan kepada UNRWA. AS menyatakan UNRWA haruslah bersikap netral dan menjalankan misinya sesuai mandat yang ditetapkan PBB. Dalam penyaluran bantuan, UNRWA diberikan beberapa persyaratan yang mana melarang pemberian kepada pengungsi yang menerima pelatihan militer untuk pembebasan Palestina. Menurut UNRWA hal ini bersifat politis dan mencoba mengatur UNRWA sebagai

¹⁷ Hamza Salman, Rohaida Nordin, Shahrul Mizan Ismail, "A Critical Appraisal of the UNRWA-USA Framework for Cooperation (2021-2022) Regarding Palestinian refugees" IIUM Law Journal. 2022

lembaga yang independen. Persyaratan ini tentu saja membuat UNRWA kesulitan dalam menyalurkan bantuan dan dinilai upaya dalam melemahkan UNRWA.

Strategi kontra-terorisme dinilai mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dengan melakukan pembatasan politik demi kepentingan negara pemberi donor. Jurnal ini mengatakan bahwa aturan yang diajukan AS membuat UNRWA menjalankan kepentingan AS dan menjadikannya sebagai lembaga yang mendukung agenda politik AS. Hal ini sejalan dengan isu yang peneliti angkat bagaimana AS melakukan intervensi terhadap UNRWA dengan memberhentikan bantuan pendanaan kemanusiaannya sebagai upaya perang melawan terorisme. UNRWA dijadikan sebagai lembaga yang digunakan oleh kelompok teror yang mengancam kepentingan AS dan Israel dalam konflik yang terjadi.

Literatur kedua merupakan tulisan dari Julieta Ocampo, Alberto Moreno, dan Estela Navarro Zapata dengan judul *Supporting Israel by withholding support to International Organizations: UNRWA and UNESCO in Trump's foreign policy*. Tulisan ini menganalisis tentang langkah-langkah yang diambil oleh Trumps administrasi kepada organisasi internasional UNRWA dan UNESCO. Dijelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh AS merupakan upaya menekan perwakilan Palestina untuk menempuh perjanjian akhir sebagai upaya perdamaian. Pada masa pemerintahan trump, trump lebih mengutamakan kepentingan nasional AS dalam sistem internasional dan tidak percaya pada organisasi internasional yang sejalan dengan kepentingan Israel.¹⁸

¹⁸ Julieta Ocampo, Alberto Moreno, Estela Navarro, "Supporting Israel by withholding support to International Organizations: UNRWA and UNESCO in Trump's foreign policy" Universidad Europea de Madrid. 2020

Dalam tulisan ini dijelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Palestina dan upaya perdamaian yang belum juga tercapai, sayangnya trump menempuh kebijakan yang menunjukkan kesenjangan kekuasaan. Misalnya, pengakuan AS terhadap yerussalem sebagai ibukota Israel dan dukungan-dukungan kepada Israel terhadap pencaplokan wilayah. Seperti yang dilakukan ke organisasi internasional UNRWA dan UNESCO yang tampak memaksa organisasi tersebut untuk menerima perjanjian apapun ditengah ancaman penghentian bantuan internasional terhadap mereka. Seperti penghentian dana terhadap UNRWA yang sejatinya akan menimbulkan gejolak politik yang besar, dikarenakan UNRWA tidak hanya lembaga bantuan kemanusiaan, akan tetapi simbol dan komitmen internasional terhadap hak pengungsi Palestina.

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi dikarenakan dapat memberikan gambaran serta informasi terkait isu yang ingin peneliti angkat. Tulisan ini memuat analisis tentang kebijakan luar negeri AS kepada organisasi internasional UNRWA dan UNESCO bagaimana trump menghentikan bantuannya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh AS merupakan sebuah upaya untuk mencapai kepentingan AS dan Israel yang dipaksakan melalui kebijakan terhadap UNRWA dan UNESCO.

Literatur ketiga merupakan tulisan dari Masako Yonekawa yang berjudul *political and military (mis)use of humanitarian action and aid: since the end of the cold war and the onset of "the war on terror"* sejak tahun 1990an, bantuan kemanusiaan di wilayah yang terkena dampak konflik telah menarik perhatian dunia. Berakhirnya perang dingin mengakibatkan runtuhnya beberapa negara dan memungkinkan para aktor kemanusiaan, termasuk PBB, dan organisasi non-pemerintahan meningkatkan akses terhadap semua pihak yang terlibat dalam

konflik yang sedang berlangsung dan terhadap meningkatnya kebutuhan kemanusiaan terkait konflik di negara-negara yang sedang mengalami konflik. lembaga-lembaga kemanusiaan terlibat dalam kerja sama dengan negara lain terutama dalam hal militer. Sebagai contoh dalam konteks konflik palang merah internasional, sangat bergantung pada pendanaan dari negara adidaya selama perang dingin, tidak lagi menerima dukungan finansial dari negara tersebut. Oleh karena itu, terpaksa mencari sumber dana lain, salah satunya melalui bantuan kemanusiaan.¹⁹

Bantuan kemanusiaan telah menjadi alat politisasi yang telah diperkuat karakter politiknya dan militerisasinya sejak berakhirnya perang dingin dan khususnya sejak dimulainya perang melawan terror setelah serangan 11 September 2001. Dalam konteks kasus yang diangkat bagaimana untuk melihat bantuan AS kepada UNRWA sarat akan politisasi sehingga AS dapat menyalahgunakan tujuan bantuan kemanusiaannya. Akibatnya, prinsip-prinsip kemanusiaan hilang sama sekali dan organisasi-organisasi kemanusiaan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mengakses penerima bantuan, termasuk pengungsi.

Bantuan kemanusiaan itu sendiri harus dianggap sebagai “*a convenient form of political action*” seperti apa yang pernah dikatakan oleh komisaris tinggi PBB, Sadako Ogata yang mengatakan tidak ada solusi kemanusiaan terhadap masalah kemanusiaan karena masalah tersebut disebabkan oleh faktor politik. Seluruh aktivitas kemanusiaan didalam dan diluar zona konflik bersifat politis

¹⁹ Masako Yonekawa, “*Political and Military (Mis) Use of Humanitarian Action and Aid: Since The End of Cold War and The Onset of “The War on Terror”* African Study Monographs, 2017

kerena kemungkinan besar terdapat berbagai aktor yang memiliki agenda tersembunyi.

Penyalahgunaan bantuan kemanusiaan dapat dilihat dari dua aktor, yaitu aktor lokal dan aktor internasional. Penyalahgunaan pada tingkat lokal, pemberian bantuan material melambangkan kekuasaan, bantuan kemanusiaan digunakan untuk meningkatkan pengakuan internasional dan tujuan politik para aktor karena bantuan memungkinkan perluasan kekuasaan negara di tingkat lokal.

Kemudian pemanfaatan lembaga kemanusiaan dan bantuan untuk strategi militer mereka. Aktor internasional juga menyalahgunakan bantuan sebagian besar untuk tujuan politik, pemerintah donor sering kali mengerahkan agen kemanusiaan untuk negara-negara sebagai tameng di wilayah konflik, sehingga negara donor dapat mengklaim bahwa mereka mengambil tindakan yang tepat dalam menangani krisis. Artinya, memang benar bahwa bantuan kemanusiaan sejalan dengan bentuk intervensi militer dan politik, sehingga membuat kabur antara agenda kemanusiaan dengan militer dan politik.

Literatur keempat merupakan tulisan dari Elena Fiddian-Qasmiyeh yang berjudul *The Changing Faces of UNRWA From the Global to the Local*. Tulisan menjelaskan tentang respon dari UNRWA terhadap keputusan Amerika yang secara drastis menghentikan kontribusinya kepada badan tersebut pada tahun 2018. Tulisan ini berfokus kepada dilemma dan peristiwa yang dialami oleh UNRWA pasca perubahan kebijakan AS tersebut. Penghentian bantuan AS ini

membuat adanya perubahan cara operasional yang dialami oleh UNRWA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Palestina.²⁰

Dalam literatur ini dijelaskan AS akan memberikan kontribusi namun, jumlahnya jauh berkurang drastis pada tahun sebelumnya yaitu hanya US\$60 juta dari sebelumnya US\$364 juta. Pemberian bantuan itu dilakukan hanya jika badan kemanusiaan tersebut mau melakukan reformasi khusus yang disetujui oleh AS. Keputusan ini dikecam secara luas diseluruh dunia sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina. Barulah pada akhir Agustus 2018 AS mengumumkan kebijakan untuk sepenuhnya menghentikan bantuan kepada UNRWA. Penghentian bantuan dana membuat beberapa kebijakan operasional UNRWA berubah seperti privatisasi kesehatan dan pendidikan di kamp pengungsi yang memberatkan rakyat Palestina untuk mengaksesnya. Pemotongan hak-hak pekerja UNRWA yang mana 95 persen merupakan rakyat Palestina, dan berbagai pelayanan UNRWA yang terpaksa dihentikan dikarenakan keterbatasan dana akibat kebijakan penghentian bantuan AS.

Literatur kelima merupakan jurnal yang ditulis oleh Maciej Huczko dengan judul *Ten facts about American Policy towards the Israel-Palestinian conflict under President Joe Biden*. Tulisan ini menjelaskan bahwa dalam konflik israel-Palestina ini AS telah lama menerapkan kebijakan terhadap solusi kedua negara. terpilihnya Presiden Joe Biden membuat beberapa kebijakan yang membatalkan, membekukan

²⁰ Elena Fiddian-Qasmiyeh “The Changing faces of UNRWA From the Global to the Local” Journal of Humanitarian Affairs. 2019

dan melanjutkan beberapa keputusan Trump untuk menciptakan lingkungan konflik yang berbeda dan kembali memulai negosiasi dengan kedua negara.²¹

Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai analisis aspek penting kebijakan Biden terhadap konflik Israel-Palestina pada masa pemerintahannya. Dalam ketarkaitannya dengan UNRWA dijelaskan bahwa kebijakan Trump terdahulu yang pro-Israel seperti pengakuan kota Yerusalem sebagai ibukota Israel membuat Palestina menarik diri dari perundingan perdamaian. Penarikan diri Palestina dari perundingan mengakibatkan pembekuan bantuan UNRWA, penutupan kantor diplomatik Palestina di Washington. Pada masa Joe Biden, menerapkan kebijakan yang bertentangan dari Trump yang ingin Palestina kembali dalam perundingan dengan membuka konsulat AS di Yerusalem dan mengembalikan bantuan kepada AS kepada UNRWA. Oleh karenanya tulisan ini layak untuk dijadikan referensi karena tulisan ini memuat analisis terkait kebijakan AS pada masa Joe Biden terutama yang berkaitan dengan UNRWA.

1.7 Kerangka Konseptual

Penggunaan teori atau konsep sangat diperlukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada dalam sebuah penelitian. Agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam permasalahan ini, peneliti menggunakan konsep *Foreign Policy Analisis*. Konsep ini penting untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini.

²¹ Maciej Huczko, "Ten facts about American Policy towards the Israeli-palestinian conflict under President Joe Biden". International Scientific Journal. 2023

1.7.1 *Foreign Policy Analysis*

Foreign Policy Analysis merupakan sebuah teori untuk mengidentifikasi sebuah kebijakan luar negeri agar dapat dipahami dan dijelaskan. Penting bagi peneliti untuk secara berhati-hati mendefinisikan atau menafsirkan sebuah kebijakan luar negeri. Untuk menafsirkan kebijakan luar negeri dengan benar maka dilakukan perbandingan yang menjadi komponen utama. Untuk membandingkan sebuah kebijakan luar negeri memerlukan titik acuan sehingga dapat membantu untuk mengidentifikasi. Setiap analisis kebijakan luar negeri mempunyai tolak ukurnya masing-masing. Charles Hermann, mengacu kepada empat hal yaitu, *the orientation, the problem, the program and the level of commitment of the foreign policy*. Peter Katzenstein membandingkan kebijakan dengan mengontraskan instrumen dan tujuannya.²²

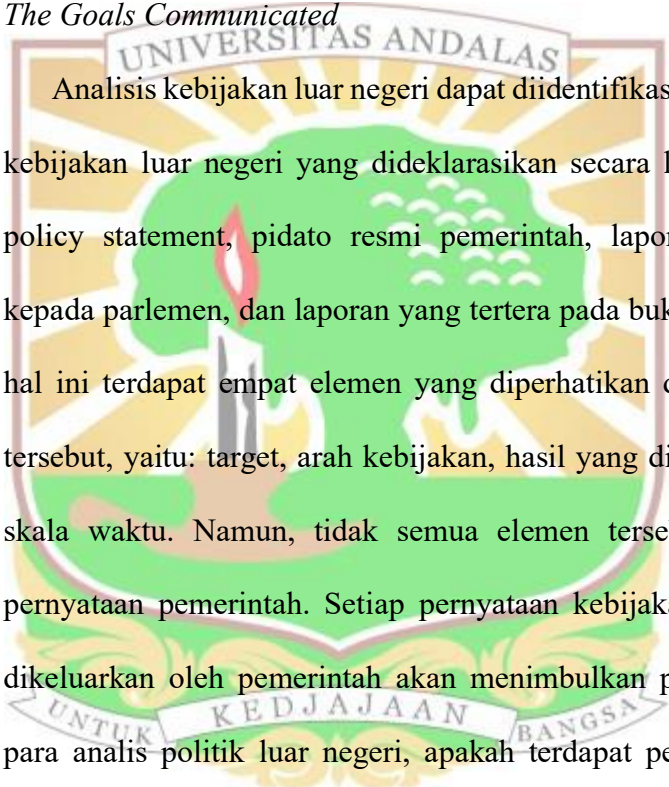
Dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap UNRWA, peneliti menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri milik Frederic Morin dan Jonathan Paquin dalam tulisannya yang berjudul *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Terdapat lima tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai sebuah kebijakan luar negeri, yaitu melalui *goals of foreign policy, Mobilized Resources, Instrument of Foreign Policy, The Process of Foreign Policy, dan The Outcome of Foreign Policy*.

1. *goals of foreign policy* dalam tulisan ini dijelaskan bahwa sebuah kebijakan luar negeri mempunyai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut analisis kebijakan luar negeri bahwa tujuan dari sebuah kebijakan

²² J.-F. Morin, J. Paquin, "Foreign Policy Analysis: A Toolbox", Canada: Palgrave Macmillan, (2018)

luar negeri adalah untuk stabilitas sistem internasional, akumulasi kekayaan, peningkatan kekuasaan relatif, dan mempertahankan pemimpin dan kekuasaan atau reproduksi identitas nasional. Untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat dari empat indikator, yaitu *the goals communicated*, *doctrine*, *national interest*, dan *deducing the goals pursued*.²³

a. *The Goals Communicated*



Analisis kebijakan luar negeri dapat diidentifikasi melalui tujuan kebijakan luar negeri yang dideklarasikan secara langsung dalam policy statement, pidato resmi pemerintah, laporan pemerintah kepada parlemen, dan laporan yang tertera pada buku putih. Dalam hal ini terdapat empat elemen yang diperhatikan dalam deklarasi tersebut, yaitu: target, arah kebijakan, hasil yang diharapkan, serta skala waktu. Namun, tidak semua elemen tersebut ada dalam pernyataan pemerintah. Setiap pernyataan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menimbulkan pertanyaan bagi para analis politik luar negeri, apakah terdapat perbedaan antara tujuan yang dinyatakan dengan yang sebenarnya ingin dicapai oleh suatu negara. dalam melihat hal ini, terdapat tiga alasan untuk menganalisis pernyataan tersebut.

Pertama, untuk menjaga reputasi dan legitimasi secara internasional, negara menyembunyikan tujuan sebenarnya dibalik

²³ J.-F. Morin, J. Paquin, "Foreign Policy Analysis: A Toolbox", Canada: Palgrave Macmillan, (2018)

tujuan yang mereka sampaikan. Seperti halnya kebijakan penghentian bantuan kepada UNRWA dinyatakan dengan isu terorisme. Kedua, para pemimpin cenderung membatasi tujuan politik mereka sehingga kemungkinan suksesnya tinggi dan karenanya meningkatkan status mereka di kancah politik internasional. Ketiga, pembuatan kebijakan cenderung menghindari pengakuan publik atas tujuan mereka karena hal ini dapat merusak kredibilitas nasional dan internasional suatu negara. Misalnya intervensi militer yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan lawan atau menerapkan kebijakan penghentian dana untuk melemahkan suatu negara dan organisasi tertentu.

b. Doctrine

Cara lain untuk mendefinisikan kebijakan luar negeri pemerintah adalah dengan mencari doktrin yang ada di dalam pemerintah. Doktrin merupakan seperangkat keyakinan, aturan dan prinsip yang memandu kebijakan luar negeri. Doktrin memberikan kerangka kerja yang menjadi pedoman pemerintah dalam menjalankan tugas dan misinya dalam sistem internasional. Doktrin biasanya dirangkum dalam pernyataan atau dokumen resmi untuk menyampaikan tujuan pemerintah kepada khalayak dalam negeri dan luar negeri. Dengan doktrin kita bisa melihat adat istiadat negara dan memprediksi kebijakan yang akan dilakukan oleh negara. namun, terkadang doktrin cenderung menimbulkan distorsi anatar sistem kepercayaan pemerintah (tendensi politik) dengan kebijakan

yang ditempu pemerintah. Sehingga analisis tidak bisa hanya mengandalkan doktrin untuk mendefinisikan tujuan politik luar negeri.

c. National Interest

Para pemimpin politik sering bersembunyi di balik kepentingan nasional negaranya ketika ditanya tentang tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, dalam faktanya seringkali tujuan politik yang menentukan konsep kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh kepentingan nasional. Menurut David Callahan, pengertian kepentingan nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan dan keinginan pemerintah. Kebutuhan menyangkut keamanan dan kedaulatan negara. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak berdampak langsung terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karenanya, pengamat kebijakan luar negeri tidak melihat kepentingan nasional atas dasar klaim para pemimpin politik, melainkan harus mendefinisikan konsep kepentingan nasional berdasarkan kebijakan yang dikembangkan sebelumnya.

d. Deducing the Goals Pursued

Kebijakan luar negeri yang diumumkan oleh pemerintah terlalu luas dan ambigu sehingga memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan kebijakan luar negeri. Salah satu teknik yang digunakan untuk mempersempit tujuan dari kebijakan luar negeri tersebut

adalah dengan melihat kebiasaan dan perilaku suatu negara, bukan melalui pernyataan publik.

2. *Mobilized Resources* merupakan power/kekuasaan yang dimiliki suatu negara dengan penerapan sumber daya apapun dalam keadaan tertentu dengan memobilisasi sumber daya, dengan mempertimbangkan struktur tertentu. kekuasaan adalah aspek kebijakan luar negeri yang dapat dinilai, dibandingkan, dan dijelaskan. Untuk melihat kemampuan negara untuk memobilisasi kekuasaan dalam kebijakan luar negerinya dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu *resources, the power paradox, mobilization and exploitation*.

a. *Resources*

Resources diartikan sebagai modal yang dapat dimobilisasi oleh negara namun jarang ditingkatkan dengan sendirinya, seperti wilayah, populasi, dan bahan mentah. pada tahun 1940, beberapa analisis kebijakan luar negeri masih berfokus hanya pada sumber daya material dan demografi, namun saat ini analisis juga mempertimbangkan sumber daya ideasional, prestise, dan patriotisme.

b. *The Power Paradox*

The Power Paradox menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki suatu negara harus dimobilisasi secara efektif dalam konteks politik kekuasaan. Ketika negara tidak berhasil mengubah sumber dayanya menjadi pengaruh, analisis kebijakan luar negeri mendefinisikan hal ini sebagai “power paradox”. Misalnya negara-negara dengan kekuatan ekonominya yang kuat gagal memberikan suatu pengaruh.

c. *Mobilization and Exploitation*

Mobilization and Exploitation menjelaskan bahwa mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh negara dan mengubahnya menjadi kemampuan yang akan menjadi instrument kebijakan luar negeri. Mobilisasi dapat didefinisikan sebagai transformasi sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kemampuan tambahan, sedangkan eksploitasi adalah transformasi kemampuan yang menjadi instrumen kebijakan luar negeri. Dalam beberapa kasus strategi mobilisasi dan eksploitasi bisa saling bertentangan, misalnya liberalisasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan mendorong mobilisasi sumber daya, namun membatasi kapasitas untuk menerapkan sanksi perdagangan.

Variabel lain yang mempengaruhi penggunaan sumber daya melibatkan pilihan antara kontrol, otonomi, dan legitimasi. Pemimpin dapat memberikan prioritas pada tiga komponen tersebut. Kebijakan yang mengedepankan pada salah satu komponen bisa saja mendiskriminasi komponen lainnya. Misalnya, menginvasi negara tetangga dapat meningkatkan sumber daya negara penyerang, namun merugikan legitimasi dimata sekutu.

3. *Instrument of Foreign Policy* menjelaskan terdapat tiga kategori dalam instrumen kebijakan luar negeri, yaitu socialization, yang menargetkan pemeliharaan atau modifikasi gagasan, coercion, yang menargetkan pemeliharaan dan perubahan kepentingan, dan intervention, yang menargetkan pemeliharaan atau modifikasi struktur politik dalam negeri negara lain.

a. *Socialization*

Socialization adalah transfer keyakinan, nilai-nilai, ide-ide dari satu aktor ke aktor lainnya. Terdapat tiga instrumen dalam *socialization*, yaitu *rational communication* menjelaskan keyakinan suatu aktor dengan validitas argument aktor lain yang membuat mereka memodifikasi gagasan mereka. *Rhetorical action* merupakan pengungkapan serangkaian argument untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang aktor yang menggunakan retorika, mendramatisasi peristiwa, membangun asosiasi baru antara ide-ide yang sebelumnya tidak terhubung dan memikirkan ekspresi yang menggugah atau menggunakan metafora untuk mempengaruhi diskusi ke arah tertentu. Berikutnya sosialisai dapa dilakukan dengan diplomasi publik yang bertujuan untuk “menaklukan hati dan pikiran” masyarakat negara lain.

b. *Coercion*

Coercion merupakan tindakan yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku negara sasaran dengan mengubah cara menghitung kepentingannya, tanpa melakukan intervensi langsung di wilayah tersebut. terdapat instrument-instrumen yang berasal dari proses berbeda dan mempunyai dampak berbeda, yang disusun menjadi lima instrumen, pertama instrument koersif yang menggunakan sanksi positif (strategi berbasis penghargaan) dan menggunakan sanksi negative untuk mendorong perilaku tertentu (strategi berbasis hukuman). Instrumen berikutnya adalah mempertentangkan ancaman sanksi dengan penerapan sanksi yang sebenarnya, instrumen paksaan yang berdasarkan tujuannya, seperti pemaksaan untuk mempertahankan status quo, instrumen pemaksaan yang

ditargetkan dengan instrumen yang mempunyai cakupan umum, yang terakhir instrumen pemaksaan sanksi yang menyasar kelompok elit. Jenis korsif lainnya adalah diplomasi koersif yang memberikan sanksi dengan tujuan mempengaruhi perilaku negara lain, logikanya bertumpu pada ancaman penggunaan kekerasan.

c. Intervention

Intervention merupakan serangan terhadap urusan dalam negeri negara lain untuk menghasilkan perubahan structural dalam negeri. Terdapat dua jenis intervensi, yaitu intervensi politik menargetkan subversi dengan mendukung kelompok pembangkang, atau stabilisasi dengan mendukung kekuasaan penguasa yang lemah. Intervensi militer merupakan upaya ancaman dengan menggunakan kekuatan militer.

d. Event-based databases

Event-based databases merupakan alat metodologis yang mampu mengintegrasikan berbagai jenis instrumen luar negeri yang dilaksanakan secara bersamaan. Tujuannya untuk memnentukan tingkat komitmen dan tingkat kerja sama antara dua pelaku. Hal ini dilakukan dengan pengkodean rinci, misalnya pertemuan bilateral bernilai +1, intervensi militer bernilai +5, dilakukan secara manual atau otomatis menggunakan kata kunci yang telah ditentukan.

4. *The Process of Foreign policy*

The Process of Foreign policy menjelaskan proses pengambilan keputusan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu *framing* yaitu proses pbingkaiian suatu masalah, *agenda-setting* merupakan pertemuan untuk

memobilisasi dan meyakinkan orang-orang penting, yang memainkan peran penting, yang mengontrol akses terhadap pemimpin, pilihan kebijakan merupakan kebijakan apa yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tertentu. Kemudian pengambilan keputusan atas pilihan kebijakan yang terbatas, penerapan menjelaskan bagaimana keputusan diinterpretasikan, diterapkan, dan terus disesuaikan dengan keadaan eksternal, terakhir evaluasi yang merupakan interpretasi terbuka dari kebijakan. luar negeri, aktor yang sama akan membingkai masalah, menggunakan kesempatan untuk berkampanye demi mempertahankan, menyesuaikan, atau merumuskan kembali kebijakan tersebut. proses pembuatan kebijakan luar negeri ini diambil dalam bentuk siklus, karena kebijakan luar negeri menghadapi masalah yang sama secara berulang berulang, seperti masalah konflik kebijakan penghentian dana AS terhadap UNRWA yang sebelumnya sudah pernah dilakukan.

5. *The outcome of Foreign Policy*

The outcome of Foreign Policy merupakan serangkaian kebijakan luar negeri mengenai kondisi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan tindakan tersebut. untuk melihat hal tersebut terdapat empat indikator, yaitu:

- a. *Measuring Effectiveness* menjelaskan tingkat efektivitas dari suatu sanksi atau kebijakan luar negeri yang diberlakukan apakah berhasil atau sebaliknya. Misalnya Kuba yang tak kunjung membayar kompensasi ke Amerika, setelah setengah abad sanksi embargo.
- b. *Feedback effects* merupakan cara lain untuk mengukur efektivitas kebijakan luar negeri. Hal ini dapat didefinisikan sebagai pesan tentang

tindakan seorang aktor, yang dikirim kembali oleh aktor tersebut, atau pesan tentang keadaan suatu sistem, yang dikirim kembali oleh aktor ke sistem. Terdapat jenis umpan balik yaitu positif dan negative yang mana kebijakan luar negeri akan melemahkan keberadaan kebijakan luar negeri tersebut. umpan balik positif membantu menjelaskan penguatan bertahap beberapa kebijakan luar negeri.

c. *Historical Institutionalism* merupakan menggunakan konsep umpan balik untuk menjelaskan kebijakan luar negerinya. *Historical Institutionalism* bergantung pada fenomena ketergantungan jalur, dengan kata lain kendala yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan dimasa lalu terhadap masa kini.

d. *Explaining effectiveness* menjelaskan variabel utama yang dapat menjelaskan efektivitas sanksi, berada pada tingkat nasional dan melekat pada karakteristik negara yang terkena sanksi. Misalnya salah satu faktor penentu keberhasilan sanksi adalah dampak ekonomi terhadap negara yang dikenai sanksi. Struktur internal negara juga menentukan keberhasilan sanksi, negara demokratis lebih sensitive terhadap sanksi yang mempunyai dampak luas secara keseluruhan, sedangkan negara otoriter lebih mudah menolaknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menganggap teori *Foreign Policy Analysis* milik Morin dan Paquin cocok untuk menjelaskan kebijakan luar negeri AS dalam menghentikan bantuan kepada UNRWA. Alasan yang dilakukan AS belum terlihat secara jelas dan perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan instrumen-instrumen yang ada dalam konsep *Foreign Policy Analysis*.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur yang dijalankan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam studi hubungan internasional, metodologi penelitian akan digunakan sebagai serangkaian prosedur untuk menjabarkan bagaimana fenomena hubungan internasional bisa terjadi.²⁴

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian dengan cara yang mudah dipahami melalui penerapan konsep sesuai dengan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif ini akan beracuan pada fakta-fakta lapangan yang bersifat naratif dan bukan angka. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis akan mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena tidak hanya secara naratif tetapi juga terdapat analisis didalamnya seperti, perilaku dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara.²⁵ Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini agar dapat menjelaskan mengapa AS menghentikan bantuannya terhadap *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees* (UNRWA).

1.8.2 Batasan Penelitian

Adapun tujuan dari pemberian Batasan masalah adalah untuk membantu mengarahkan penelitian agar lebih spesifik dan jelas sehingga dapat difokuskan kepada pokok permasalahan. Peneliti telah menetapkan tahun 2023 sampai saat ini

²⁴ Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", 1994

²⁵ John Creswell and David Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", Sage Publications Inc: United States of America, 2018, hal. 162.

sebagai tahun batasan dari penelitian ini. Rentang waktu ini dipilih karena pada tahun 2023 merupakan tahun dimana konflik terbaru terjadi antara Israel-Palestina. Sedangkan, rentang waktu sampai saat ini dipilih karena penghentian bantuan dana AS kepada UNRWA masih berlangsung hingga saat ini.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau biasa disebut variabel dependen merupakan objek penelitian yang perilakunya akan dideskripsikan atau dianalisis dalam sebuah penelitian. Sedangkan unit eksplanasi atau biasa disebut variabel independen adalah objek yang mempengaruhi unit analisis.²⁶ Dalam penelitian ini objek yang perilakunya akan diamati atau unit analisisnya adalah kebijakan luar negeri AS. Sedangkan, unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees* (UNRWA). Level analisis dalam studi hubungan internasional merupakan tingkat besaran masalah yang akan diteliti.²⁷ Level analisis dalam penelitian ini berada pada tingkatan negara-bangsa karena melibatkan hubungan suatu negara dengan organisasi internasional, yaitu Amerika Serikat (AS) dan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees* (UNRWA).

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data menggunakan data Primer dan data Sekunder. Data Primer merupakan data yang

²⁶ Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", 1994

²⁷ Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", 1994

diperoleh secara langsung dari informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber perantara atau tidak langsung.²⁸

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui beberapa cara seperti obeservasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan.²⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, atau obeservasi yang dilakukan peneliti melalui internet dan sosial media objek terkait dengan memanfaatkan hasil wawancara mentah yang belum diinterpretasikan oleh pihak lain. Contohnya seperti hasil wawancara terkait isu penghentian bantuan AS terhadap UNRWA melalui media *Al-Jazeera* yang nantinya penulis akan memilah informasi sesuai kebutuhan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dari perantara atau tidak langsung, seperti dari orang lain atau dokumen.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder seperti *website*, sumber media *online*, berita, dan studi literatur sebagai berikut:

1. Sumber media *online*

Sumber media *online* yang digunakan seperti akun media sosial dan pernyataan pers. Peneliti mengumpulkan sumber media *online* dari akun sosial media resmi UNRWA (@unrwa)

2. *Website*

²⁸ Sugioyo, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. 2015

²⁹ Sugioyo, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. 2015

³⁰ Sugioyo, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. 2015

Data yang digunakan berasal dari *website* pemerintah AS dan UNRWA, maupun PBB yaitu, www.unrwa.org, www.un.org, www.unwatch.org, www.usaid.gov, www.state.gov,

3. Sumber berita *online*

Saluran berita BBC news melalui <https://www.bbc.com/news>, Al-Jazeera melalui <https://www.aljazeera.com>, Washingtonpost melalui <https://www.washingtonpost.com>, dan Politico.com melalui <https://www.polito.com>

4. Buku

Buku yang digunakan yaitu *Foreign Policy Analsis: A Toolbox* oleh Frederic Morin dan Jonathan paquin

5. Artikel Jurnal

Artikel jurnal ilmiah seperti *The Changing Faces of UNRWA from the Global to the Local* oleh Elena Fiddian-Qasmiyeh, *Political and Military (mis)use of humanitarian action and aid: since the end of cold war and the onset of “the war on terror”* oleh Masako Yonekawa, *Ten facts about American policy towards the Israel-Palestine conflict Under Presiden Joe Biden* oleh Maciej Huczko, *Supporting Israel by withholding support to International Organizations: UNRWA and UNESCO in Trump’s foreign policy.* oleh Julieta Ocampo, Alberto Moreno, dan Estela Navarro Zapata, *A Critical Appraisal of the UNRWA-USA Framework Cooperation (2021-2022) Regarding Palestinian Refugees* oleh Hamza Salman, rohaida Nordin dan Shahrul Mizan Ismail.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data menurut Creswell secara umum dimulai dengan mengumpulkan data-data kualitatif lalu memisahkan data tersebut sesuai segmentasinya untuk disatukan kembali dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.³¹ Dalam menganalisis data terkait penelitian, peneliti mengacu pada tahapan analisis data yang dikemukakan oleh Creswell dalam karyanya *Research design: Qualitative, Quantitative, dan Mixed Methods Approaches* yaitu:

1. Menyiapkan data untuk dianalisis

Pada tahap ini, langkah pertama yang harus dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan disiapkan dengan cara disortir untuk mengetahui jenisnya tergantung dari mana data tersebut didapatkan. Misalnya dalam penelitian ini penulis memiliki dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

2. Membaca keseluruhan data

Pada tahap ini, membaca data yang telah disiapkan sebelumnya guna membentuk pemahaman dan gambaran umum dari penelitian atas informasi yang telah didapatkan. Pada tahap ini, peneliti akan membaca berbagai sumber untuk membentuk gagasan umum mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS dalam menghentikan bantuannya kepada UNRWA.

3. Memulai koding terhadap semua data

³¹ John Creswell and David Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", Sage Publications Inc: United States of America, 2018

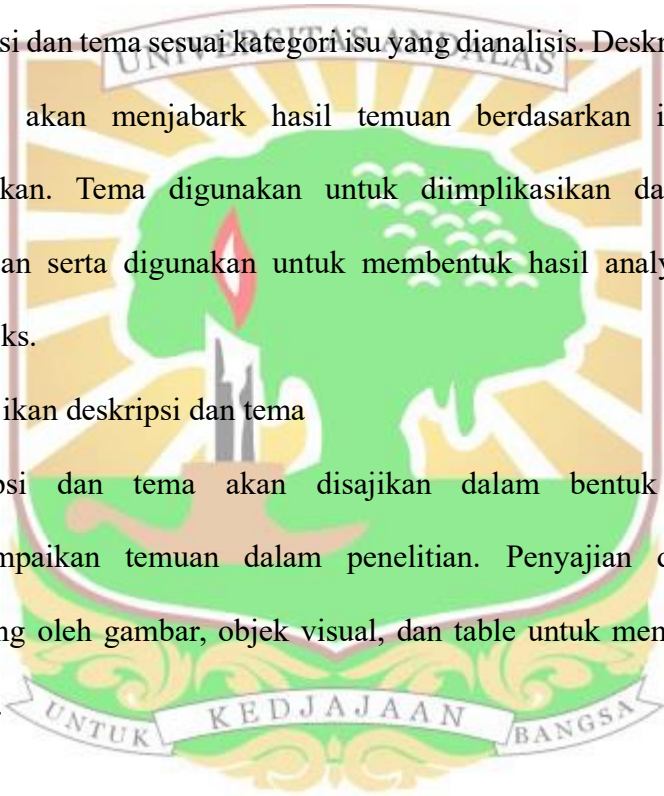
Merupakan tahap mengorganisir data sesuai dengan segmentasinya. Hal ini menyangkut dengan pengelompokan gambar, kalimat, dan data lainnya ke dalam kategori masing-masing. Data yang diperoleh akan dikelompokkan ke dalam kategori kebijakan luar negeri AS terhadap Israel-Palestina dan mengenai informasi tentang UNRWA.

4. Membuat deskripsi dan tema

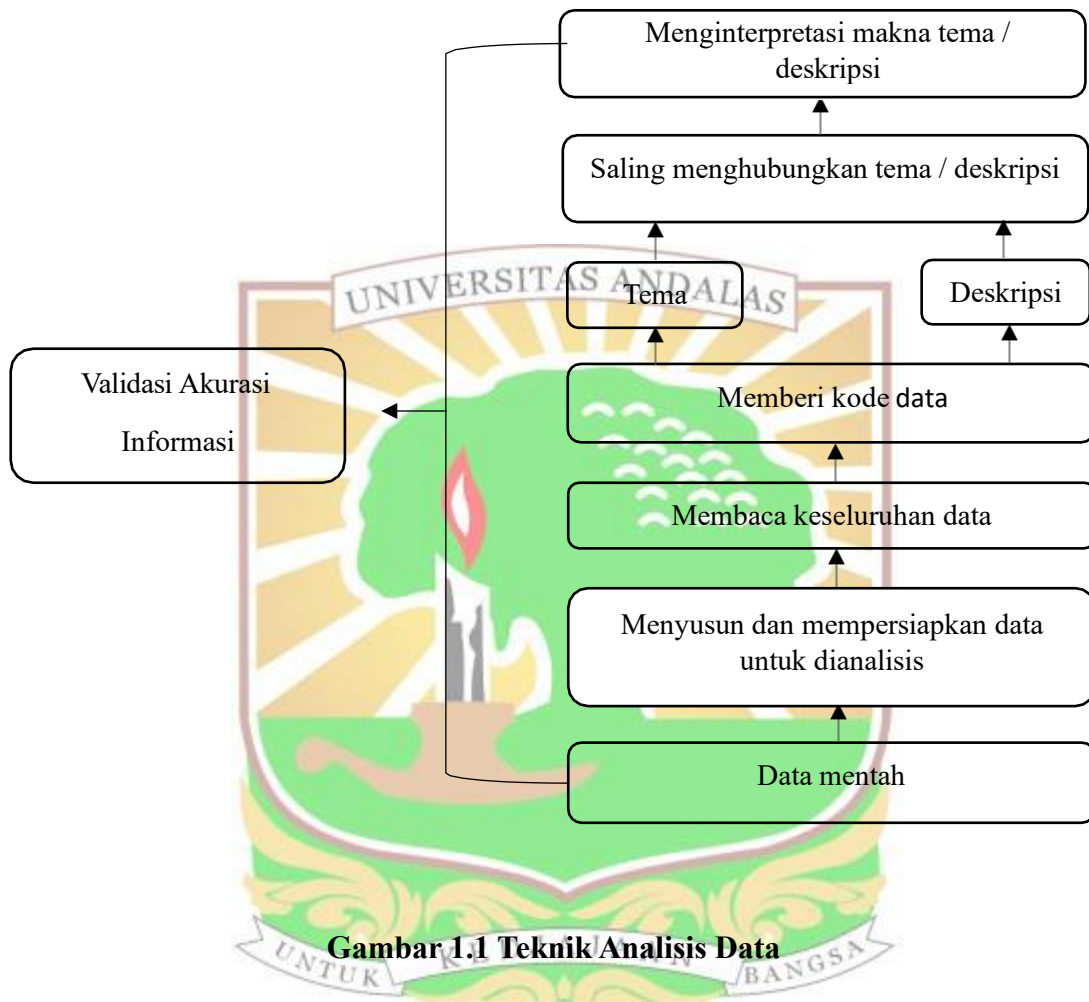
Kode yang telah dibuat sebelumnya digunakan untuk menghasilkan deskripsi dan tema sesuai kategori isu yang dianalisis. Deskripsi maksudnya peneliti akan menjabarkan hasil temuan berdasarkan informasi yang didapatkan. Tema digunakan untuk diimplikasikan dalam penulisan penelitian serta digunakan untuk membentuk hasil analisis yang lebih kompleks.

5. Menyajikan deskripsi dan tema

Deskripsi dan tema akan disajikan dalam bentuk narasi untuk menyampaikan temuan dalam penelitian. Penyajian deskripsi dapat didukung oleh gambar, objek visual, dan table untuk memperdalam hasil diskusi.



Kerangka Analisis Data



Gambar 1.1 Teknik Analisis Data

Sumber: Creswell (2018)

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi Pustaka, kerangka konseptuan, pendekatan dan

jenis penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS TERHADAP ISU ISRAEL-PALESTINA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai, apasaja kebijakan-kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh AS terhadap isu Israel-Palestina

BAB III UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES (UNRWA)

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara rinci mengenai UNRWA, serta informasi-insformasi terkait dengan UNRWA terutama pasca konflik 7 Oktober yang lalu.

BAB IV ANALISIS ALASAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN BANTUAN AS TERHADAP UNRWA

Bab ini akan mendeskripsikan hasil analisis terkait alasan mengapa AS menghentikan bantuan luar negerinya terhadap UNRWA

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan yang mana peneliti akan menarik sebuah kesimpulan, saran terkait penelitian, dan daftar Pustaka

